

ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI DAN PERAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YALIMO

Penulis:

Estepanus Lolo Kassa¹
estepanus.kassa@gmail.com
Meinarni Asnawi²
meinarni.asnawi@gmail.com
Bill Pangayouw³
billpangayow@gmail.com

Abstract

The purpose of the study is those the role of participation and information systems in regional financial management on the performance of regional governments. The Data Analysis Method uses an econometric approach in formulating estimated effects between variables through OLS. While the mean score of the sub indicators uses Quantitative Descriptive. Research results show: (1) Participation in the preparation of the APBD, shows a pattern of positive relations between the level of participation and the public presentation of local governments. So that participation is an important and a dominant aspect capable of encouraging the performance of local government, (2) Regional Financial Management Information System, is a form of cutting down the bureaucratic flow in technical management of regional finance, this research encourages the public presentation of regional government from regional financial aspects. An influence of 38 percent, (3) participation in the preparation of APBD and technical management of regional finance using the SIKD system, will positively support the increase in local government performance by 85.9 percent.

Keywords: *Participation, Regional Financial Management Information System, Local Government Performance*

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintahan tidak mengakui kepemilikan (*self interest*) yang bisa memaksakan pencapaian tujuan. Pemerintah Daerah tidak juga memprioritaskan faktor persaingan yang sering digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi. Disamping bahwa, pemerintah daerah tidak memiliki ukuran yang pasti mengenai keberhasilan seperti dalam organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Setelah diberlakukannya UU/22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU/32/2004 dan UU/25 1999 berikutnya direvisi kembali menjadi UU/33/2004 tentang Neraca Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini telah mengakibatkan pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNCEN

Sementara itu, Mardiasmo (2002), menjelaskan beberapa misi yang terdapat dalam otonomi daerah, Pertama, membentuk efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan bobot layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang untuk orang untuk berpartisipasi dalam perubahan dalam sistem manajemen keuangan pemerintah. Otonomi kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dalam bentuk otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sedangkan Fathillah, (2001). Menjekaskan bahwa Dalam kerangka akuntabilitas publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran ekonomis, efisien, dan efektif (*Value for Money*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengalaman yang telah terjadi sejauh ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih menjadi perhatian. Anggaran di daerah, terutama pengeluaran daerah belum mampu bertindak sebagai insentif untuk mendorong laju pembangunan di daerah di sisi lain banyak ditemukan mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan tidak mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif.

Penelitian yang dilakukan Kenis (1979), Brownell (1982), Brownell dan McInnes (1986), Frucot dan Shearon (1991), Indriantoro (1995), menemukan bahwa penganggaran dan partisipasi memiliki hubungan positif. Partisipasi penganggaran adalah pendekatan yang umumnya dapat meningkatkan kinerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Nor, 2007). adalah proses yang menggambarkan individu yang terlibat di dalam penganggaran dan memiliki kuasa terhadap target anggaran. Beberapa peneliti telah menguji pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial, namun bukti empiris atau pengalaman memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten atau tidak cocok.

Menurut Kenis (1979), Brownell dan McInnes (1986) dan Indriantoro (1993) masalah yang berkaitan dengan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, kinerja dan hal-hal lain, telah menjadi pusat perhatian banyak peneliti, terutama dalam domain akuntansi perilaku.

Kondisi faktual dimana kualitas partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran masih belum optimal selain itu dalam rangka mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah belum tidak maksimal dilakukan melalui Sistem Informasi yang berkualitas. Sehingga ada beberapa upaya yang

dilakukan Daerah, yang tercermin dalam Dokumen RKPD Tahun 2017 dengan sasaran "Terwujudnya sistem pengelolaan dan manajemen pemerintahan daerah yang kredibel, akuntabel dan berwibawa"

Melalui informan kunci seperti Kepala Dinas, Sekertaris, dan Pimpinan OPD sampel penelitian, bahwa Partisipasi dan Sistem Informasi Keuangan Daerah belum berjalan dengan maksimal hal tersebut disebabkan antara lain: (1) Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam musrembang, (2) Kapasitas SDM masyarakat yang masih lemah dalam memahami siklus perencanaan dan penganggaran, (3) Kapasitas SDM Pada Bidang Program belum sepenuhnya merata, (4) Belum maksimalnya infrastruktur yang mendukung untuk sistem informasi keuangan daerah, (5) Kapasitas SDM Pengelola dan tingginya ketergantungan dengan staf ahli.

Beberapa kondisi faktual diatas, dengan disertai dukungan beberapa penelitian yang telah dilakukan di beberapa daerah, maka peneliti ingin lebih jauh mengkaji apakah ada dampak dalam menaikkan kemampuan Daerah jika adanya peningkatan pada Partisipasi maupun telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Sehingga peneliti bertujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengukur: partisipasi, sistem informasi manajemen keuangan daerah, peran sistem informasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Menurut Mamesah (1995) keuangan daerah adalah semua hak dan tanggungjawab yang dinilai dengan uang, serta semua hal dalam bentuk uang atau barang yang digunakan sebagai kekayaan daerah selama mereka belum dikendalikan oleh negara bagian atau wilayah yang lebih tinggi, dan pihak-pihak lain dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fres, Niswonger dan Waren (1995) membuat arti anggaran sebagai berikut: "Anggaran adalah pernyataan tertulis resmi mengenai rencana pengelolaan untuk masa depan dan perbandingan berkala hasil sebenarnya dengan tujuan. Berdasarkan pendapat diatas di simpulkan bahwa anggaran merupakan penetapan tujuan spesifik bagi perbandingan hasil aktual dan masa depan dengan tujuan secara berkala.

Mardiasmo (2000) menyebut salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur dengan hati-hati adalah masalah mengelola keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah adalah alat kebijakan fundamental bagi pemerintah daerah. Sebagai alat kebijakan, anggaran daerah menempati posisi penting dalam upaya mengembangkan kemampuan dan keefektipan Pemerintah Daerah.

Menurut Brownell (1986) keterlibatan dalam penganggaran, yaitu proses pengikutsertaan individu akan dievaluasi, dan dapat diberi penghargaan berdasarkan pencapaian mereka pada target (sasara dianggarkan di mana mereka terlibat dalam proses dan memiliki pengaruh dalam menentukan target tersebut. Siegel dan Marconi (1989), menyampaikan keikutsertaan manajer dalam penganggaran akan mengarah pada inisiatif bagi mereka untuk memberi ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan rasa kepemilikan, sehingga kolaborasi antara anggota dalam mencapai tujuan juga meningkat. Dengan demikian partisipasi dalam menyiapkan anggaran adalah cara yang efektif untuk menciptakan harmoni dan tujuan dari setiap pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi dengan tujuan keseluruhan organisasi.

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sistem yang mendokumentasikan, mengelola, dan memproses data manajemen keuangan regional dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam kerangka perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan akuntabilitas. (PP RI N/56/2005 : Pasal 1 ayat 15). Sedangkan Informasi yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri adalah dalam konteks Laporan tentang Implementasi Pemerintah Daerah di Sektor Keuangan (PP RI No. 56 tahun 2005: Pasal 2 ayat 2). Menceritakan Informasi Keuangan Daerah (IKD) dilakukan secara periodik melalui dokumen tertulis dan media lainnya (PP RI No. 56 Tahun 2005: Pasal 6).

Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja adalah deskripsi tingkat pencapaian suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi terdapat dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Hawkins (*The Oxford Paperback Dictionary*, 1979) membuat rekomendasi kinerja sebagai berikut: "Pertunjukan adalah: (1) proses pertunjukan, (2) tindakan atau pertemuan yang menarik, (3) presentasi sandiwara atau hiburan lainnya". Sementara dalam buku Modul Pendidikan Auditor Sektor Non-Publik, menyatakan bahwa kinerja adalah pencapaian output (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh orang atau kelompok orang dalam organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi dalam rangka mencapai misi organisasi dan tujuan melalui melakukan serangkaian kegiatan.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Berarti seluruh Pegawai pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo yang berjumlah 24 OPD yang terdiri dari 10 Dinas, 7 Kantor, 3 Badan, 2 Sekretariat, Inspektorat dan PPKD. Sedangkan sampel penelitian adalah kepala OPD selaku pengguna anggaran/barang dan satu tingkat dibawah kepala OPD yang berperan sebagai pengguna anggaran pada pemerintah Kabupaten Yalimo. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel nonprobabilitas yang memenuhi pertimbangan tertentu.

2. Definisi Operasional

Pengukuran variabel penelitian sesuai dengan aturan atau ukuran skala yang umumnya diterima secara akademis, pemahaman operasional variabel adalah:

- a. Kinerja Pemerintah Daerah.** Merupakan kondisi dimana, adanya peningkatan Kinerja Daerah melalui bentuk adanya kinerja akuntabilitas penyelenggaraan yang dinilai oleh lembaga terkait. Selain itu juga, kinerja pemerintah daerah dari segi opini publik;
- b. Partisipasi.** Suatu keterlibatan seseorang atas pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi merupakan salah satu prinsip yang patut diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sistem Informasi Keuangan Daerah.** informasi berbasis komputer yang memproses data keuangan regional yang berkaitan dengan informasi transaksi dalam periode akuntansi dan tersaji dalam bentuk laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan;

3. Pendekatan Ekonometrik

Pendekatan *OLS* dengan teknis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mencari tahu ada tidaknya hubungan ketergantungan dan arah hubungan ketergantungan antara variabel bebas atau independen (X) dengan variabel terikat atau dependen (Y) apakah positif atau negative. Dalam Ghozali, (2006) dijelaskan Estimasi dilakukan untuk menggambarkan pola hubungan menjadi fungsi atau persamaan yang ada di antara variabel-variabel ini. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$

Keterangan

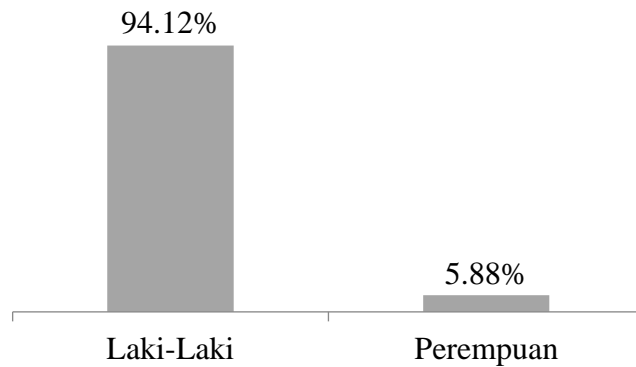
- Y = Variabel dependen (Kinerja Pemerintah Daerah)
X1 = Variabel independen (Partisipasi dalam Penganggaran)
X2 = Variabel independen (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
A = Konstanta
b1, b2 = Koefisien regresi variabel bebas
e = Variabel lain yang tidak diteliti atau dimasukkan dalam model

Setelah model persamaan telah diperoleh, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti, dimana jawaban itu masih bersifat lemah, dan wajib dilakukan pengujian secara empiris kebenarannya, dengan melakukan pembuktian statistic melalui Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-T). Uji t untuk mengecek signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1, dan X2 (motivasi eksternal dan motivasi internal) sangat mempengaruhi variabel Y (kinerja pegawai) secara individual atau parsial (Ghozali, 2006). Uji hipotesis yang diterapkan dalam penelitian ini ialah, secara langsung melihat tingkat signifikansi hasil penelitian yang berada pada output SPSS, ketentuan utama penerimaan dan penolakan hiotesa ialah pada besar kecilnya hasil signifikansi pada tabel koefisien pada output SPSS.

PEMBAHASAN

1. Profil Responden Penelitian

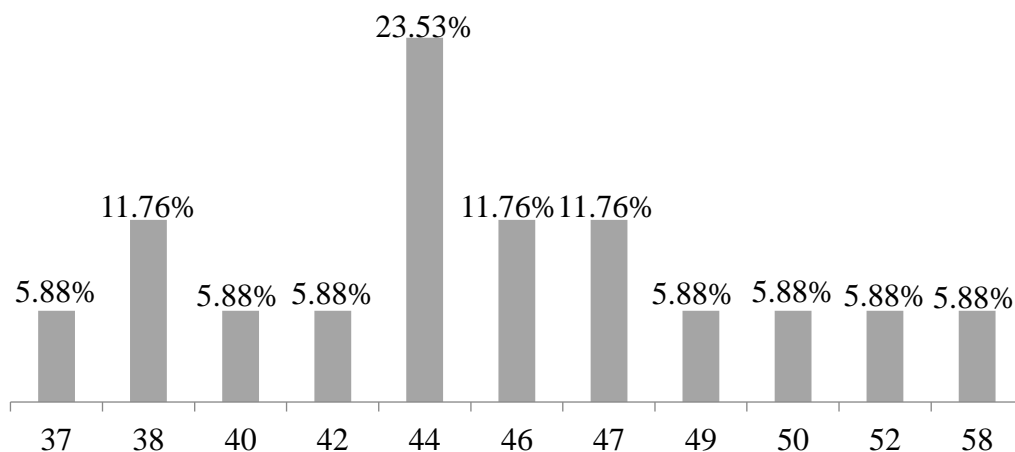
Berdasarkan penetapan metodologi penelitian ini, telah ditetapkan beberapa fokus informan/key informan dalam peneltian ini. Adapun fokus utama ialah kelompok SKPD dimana terdapat 17 responden yang berhasil di lakukan pencatatan informasi melalui peneliti. Adapun rincian analisis deskripsi mengenai responden sebagai berikut.



Gambar 1
Distribusi Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Data diolah, 2017

Keseluruhan responden merupakan pegawai negeri di Pemerintah Daerah. Jumlah keseluruhan responden sebanyak 17 responden. Dimana berdasarkan gambar diatas terbagi atas 7294,12 persen laki-laki dan 5,88 persen perempuan. Berdasarkan keterwakilan antar gender dapat dikatakan belum terwakili disebabkan kondisi dan situasi daerah. Dimana potret realitas bahwa posisi strategis masih dominan di jabati atau diduduki oleh kaum laki-laki. Sehingga dalam penelitian ini, dominan bersumber dari informan/key informan berjenis kelamin laki-laki.

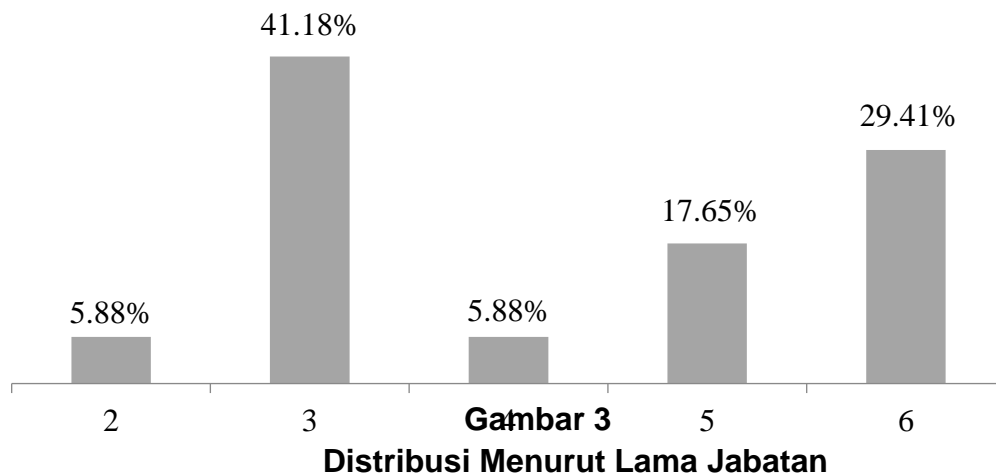


Gambar 2
Distribusi Menurut Jabatan

Sumber: Data diolah, 2017

Jabatan responden memiliki peranan penting dalam penelitian ini. Kandungan kekayaan dan informasi data dan informasi sangat penting dalam kerangka proses analisis selanjutnya. Jabatan seorang responden menunjukkan kondisi kapasitas dan kapabilitas dari data dan informasi dalam penelitian ini.

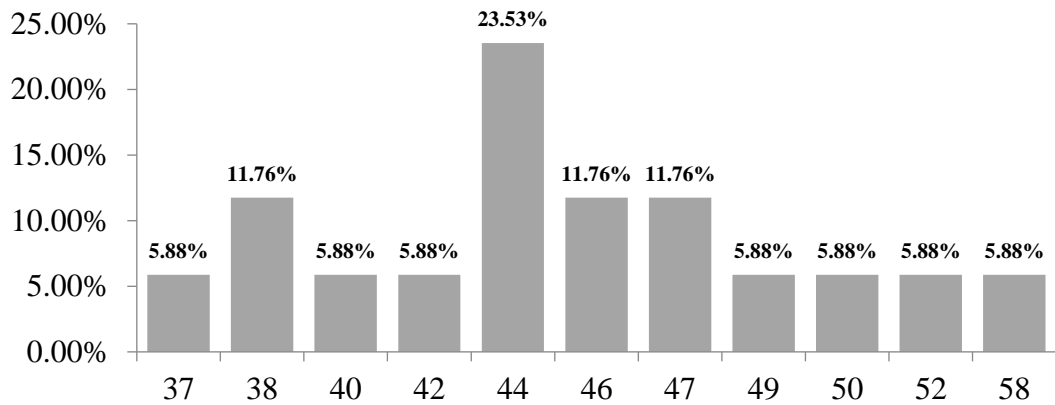
Realisasi responden yang berasal dari Pemerintah Daerah ialah dimana level kepala OPD terdapat 23,53 persen, selanjutnya level sekretaris dinas sebanyak 29,41 persen, adapun keterwakilan pelaksana teknis di lingkup dinas yakni kepala bidang/kasubag terdapat 47,06 persen hal ini selanjutnya menjadi kelompok jabatan terbesar dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini. Melalui kondisi data faktual diatas, maka dapat di tarik suatu kondisi bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.



Sumber: Data diolah, 2017

Dipahami bahwa lama jabatan seorang responden dapat mendukung responden dalam memahami situasi dan isu-isu yang diangkat dalam penelitian. Sehingga keakuratan informasi dapat disebutkan valid dan akurat. Pada bagian yang berbeda bahwa informan dalam kajian ini dominan pada level Kepala OPD. Diketahui bahwa Pemerintah Daerah sesuai kondisi gambaran umum diatas bahwa disebutkan terbentuk tahun 2008 dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya. Sehingga pada tahun 2017 saat ini kurang lebih telah mencapai umur 10 tahun masa perjalanan pemerintahan daerah.

Diketahui bahwa realisasi capaian perelohan data dan informasi dapat disajikan melalui posisi lama jabatan, ternyata cukup banyak kelompok informan yang telah berada sejak awal pemerintah daerah yalimo terbentuk, hal ini tentunya mendukung kualitas informasi yang ingin diketahui dalam penelitian yang dilaksanakan saat ini.



Gambar 4
Distribusi Menurut Usia

Sumber: Data diolah, 2017

Responden berdasarkan usia pada penelitian ini, dapat dikatakan dominan pada responden usia 38 tahun yakni sebanyak 11,76 persen. Sedangkan responden usia 44 tahun sebanyak 23,53 persen, responden dengan umur 49-58 tahun masing-masing sebanyak 5,88%. Berdasarkan kondisi faktual responden diatas maka, keterwakilan informan dalam memberikan persepsi terkait kinerja pemerintah daerah, partisipasi penganggaran, dan informasi keuangan daerah yang menjadi variabel-variabel utama dalam penelitian ini.

Melalui keseluruhan faktual responden dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa valid dan akurat berdasarkan ruang lingkup sumber data. Sehingga peneliti merasa yakin untuk menjadikan keseluruhan data dan informasi penelitian ini menjadi dasar dalam proses analisis lebih lanjut dan proses interpretasi mendalam dalam menemukan kondisi sebab akibat maupun hubungan pengaruh yang mampu mendorong terciptanya Kemampuan Daerah dalam manajemen keuangan daerah.

2. Hasil Analisis dan Informasi

Hasil pengukuran data dan informasi memakai alat statistic *IBM SPSS Version 24*. Beberapa pengungkapan hasil rumusan Regresi Linier berganda dalam penelitian ini disajikan sesuai dengan tabel output SPSS. Adapun beberapa sajian tabel utama dalam analisis data ialah (1) Tabel Statistik Deskripti, (2) Tabel *Model Summary*, (3) Tabel *Coefficients*.

Tabel 1. Statistik Desriptif Model Regresi Penelitian

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Pemerintah Daerah	29.7141	5.45351	17
Partisipasi	30.2285	4.20264	17
Sistem Informasi Keuangan Daerah	25.6192	4.71286	17

Sumber: Data diolah, 2017

Dalam penelitian diketahui menggunakan tiga variabel utama, antara lain Variabel Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel yang akan di estimasi, dan variabel partisipasi dan sistem informasi merupakan variabel yang menjadi basis estimasi terhadap variabel terikat (*Dependent Variavel*).

Berdasarkan tabel diatas, dapat informasi bahwa variabel Kinerja Pemerintah Daerah memiliki nilai mean sebesar 29.71, selanjutnya variabel partisipasi sebesar 30.22, sedangkan variabel sistem informasi mendapatkan nilai mean sebesar 25,61. Kondisi ini diperoleh melalui 17 responden yang memberikan persepsi mereka terhadap setiap item dalam pernyataan penelitian.

Tabel 2 Model Summary Regresi Penelitian

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.677 ^a	.859	.381	4.28916	.459	5.933	2	14	.014

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Keuangan Daerah, Partisipasi

Sumber: Data diolah, 2017

Dalam rangka menemukan pola hubungan antara variabel terikat Kinerja Pemerintah Daerah dan variabel bebas Partisipasi dan Sistem Informasi. Maka peneliti perlu melihat sejauh mana mengukur dan mengetahui sisitivitas dan keakuratan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini.

Tabel 2 diatas, terungkap bahwa variabel bebas partisipasi dan sistem informasi mampu menjelaskan variabel terikat secara baik, pernyataan ini didukung dengan perolehan nilai R-Square sebesar 85,9 persen. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa, hanya sekitar 14,1 persen variabel terikat Kinerja Pemerintah Daerah dapat diterangkan oleh variabel lainnya seperti kualitas pendidikan. Sehingga secara simultan variabel bebas dalam riset ini baik untuk dijadikan salah satu model kinerja Pemerintah Daerah.

Selain itu juga secara pengukuran statistik, pernyataan ini diperkuat dengan tambahan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,014 nilai ini lebih kecil dari standar probabilitas yang ditentukan sebelumnya yakni 0,05 atau tingkat kesalahan 5 persen. Melalui kondisi faktual diatas, maka secara statistik terdapat kecukupan variasi data yang mampu mengungkapkan kinerja pemerintah daerah menggunakan variabel partisipasi dan sistem informasi. Sehingga model persamaan linier atau regresi linier berganda dalam penelitian ini baik untuk dijadikan dasar analisis.

Tabel 3 Koefisien Regresi Penelitian

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.089	10.045		1.701	.111
	Partisipasi	.740	.256	.571	2.896	.012
	Sistem Informasi Keuangan Daerah	.381	.228	.329	1.671	.117

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Data diolah, 2017

Secara simultan terhadap hubungan yang positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sehingga model yang dihasilkan dari tabel koefisien mampu dijadikan salah satu bentuk model matematis Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Tabel 3 diatas, maka secara uji teoritis bahwa telah sesuai dimana hal ini ditunjukkan dengan pola tanda hubungan yang positif antara variabel.

Melalui sajian hasil pengukuran statistik diatas, maka dapat dirumuskan pola hubungan antara variabel sebagai berikut: **Kinerja Pemerintah Daerah = 17.089+ 0.740 (0.012) Partisipasi + 0.381 (0.117) Sistem Informasi**. Secara simultan model ini dapat dikatakan baik dikarenakan memiliki tingkat signifikansi hitung 0.05, kondisi serupa secara parsial dimana masing-masing variabel bebas memiliki tingkat signifikansi 0,05 selain itu juga dikaji berdasarkan teoritis bahwa model ini sejalan dengan ekspektasi dari kondisi pengungkapan teoritis dimana kedua variabel bebas memiliki pola positif terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga secara parsial model ini layak untuk dijadikan model.

Berdasarkan hasil signifikansi hasil perhitungan estimasi koefisien regresi berganda diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas pada penelitian ini H0 (menolak) dan H1 (menerima) pada keseluruhan variabel bebas. Hal ini diklarifikasi melalui hasil pengujian tingkat signifikansi dimana

variabel bebas Partisipasi (X1) memiliki hasil tingkat signifikansi 0.01 dibawah nilai probabilitas 0.05 dan kondisi serupa pada Sistem Informasi (X2) yang memiliki hasil tingkat signifikansi sebesar 0.117 dimana lebih besar dari 0.05.

Tindak lanjut pola hubungan statistik secara sendiri-sendiri dapat dijelaskan terperinci pada untuk masing-masing pola hubungan variabel bebas. Berdasarkan Tabel 3 diatas, maka pola hubungan variabel Partisipasi (X1) memiliki pola positif yang mana menunjukkan apabila terjadi kenaikan tingkat partisipasi stakeholders penganggaran mampu memberikan peluang terjadi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 74, persen, sedangkan variabel Sistem Informasi (X2) serupa bahwa terdapat pola hubungan yang positif dengan variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dimana jika terjadi perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah melalui optimalnya informasi keuangan daerah mampu mendorong terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 38,1 persen.

Berdasarkan perolehan hasil pengukuran koefisien regresi, maka model Kinerja Pemerintah Daerah dominan dipengaruhi secara nyata oleh Variabel Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sehingga jika diasumsikan bahwa, pada waktu mendatang terjadi pembenahan pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan daerah, maka diyakini mampu memberikan efek atau dampak yang berarti pada Kinerja Pemerintah Daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah dalam penelitian ini, lebih condong ke kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kerangka penelitian ini memberikan keyakinan bahwa sebenarnya peneliti memberikan harapan besar terhadap partisipasi dan sistem informasi dalam mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya menjadi satu dari kabupaten di pegunungan yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi.

Berdasarkan hasil pengukuran secara statistik maupun ekonometrik dalam penelitian ini, diperoleh sejumlah hasil rumusan nilai estimasi ke depan dalam upaya mengubah sistem pengelolaan keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip dalam mengelola keuangan daerah maupun Negara, untuk itu kepatutan ini perlu masuk dalam aktivitas penyusunan APBD.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa dugaan positif jika adanya peningkatan partisipasi mampu mendorong terjadinya kinerja pemerintah daerah di kabupaten yalimo. Sejumlah *stakeholder* kunci mengungkapkan bahwa keterwakilan masyarakat dan seluruh OPD yang ada mampu mendorong

adanya peningkatan kinerja daerah.

Begitu pula dengan mekanisme pengelolaan sistem informasi keuangan daerah, *stakeholder* sangat memberikan penilaian penting dalam kedudukannya bagi upaya peningkatan kinerja daerah. Namun dengan kondisi kabupaten yang baru dimekarkan dan masih dalam kategori belia, masih terdapat sejumlah peta persoalan yang perlu di tuntaskan secara bersama dalam kerangka meningkatkan sistem informasi keuangan daerah dalam kerangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel.

Beberapa stakeholder kunci memberikan suatu pandangan bahwa perlu pembenahan di beberapa aspek (1) Kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, (2) Secara rutin menambah wawasan dalam hal perubahan-perubahan perundang-undangan dan konsep-konsep pengelolaan keuangan daerah, (3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana manajemen keuangan daerah yang berbasis pada sistem informasi di seluruh jajaran OPD maupun pada distrik dan kampung. Hal ini juga selaras dengan sumbangsih ilmiah dalam mendukung pencapaian misi RPJMD pada misi Penataan Birokasi Dan Pelayanan Publik.

Dalam menjawab tantangan tersebut, terdapat beberapa penemuan yang perlu di perhatikan sesuai dengan fokus penelitian ini, antara lain aspek partisipasi penuh dalam penyusunan anggaran perlu menjadi suatu prinsip yang selalu akan dipandang penting oleh setiap pemilik kepentingan di daerah ini.

Tabel 4 Rata-rata Skor Persepsi Key Informan Terhadap Transparansi

No	Upaya Mengejewantakan Transparansi	Rata-rata Skor
1	Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan RKA/DPA oleh TAPD	3.76
2	Selama ini pendapat yang relevan selalu menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran dengan TAPD	4.00
3	Turut Serta dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum	4.00
4	Turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan DPA OPD	3.88
5	Keterlibatan Kepala dan sekretaris instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama TAPD	4.00
6	Keterlibatan Kepala Bidang serta Staf instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama TAPD	3.88
7	Partisipasi dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	4.06

Sumber: Data diolah, 2017

Beberapa hal teknis yang perlu di perbaiki di kemudian hari melalui komitmen bersama yakni (1) Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan RKA/DPA oleh TAPD, (2) Selama ini pendapat yang relevan selalu menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran dengan TAPD, (3) Turut Serta dalam penyusunan Arah Kebijakan Umum, (4) Turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan DPA OPD, (5) Keterlibatan Kepala dan sekretaris instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama TAPD, (6) Keterlibatan Kepala Bidang serta Staf instansi/OPD dalam pembahasan anggaran bersama TAPD, (7) Adanya partisipasi dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Beberapa hal teknis terkait partisipasi menjadi konsen dari informasi kunci atau sumber terpenting dalam penelitian ini dimana rata-rata memberikan skor 3-4 skor ini memiliki makna bahwa responden mengatakan hal ini penting dalam rangka meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD. hal ini menandakan bahwa dalam kerangka mendukung kinerja pemerintah daerah pada perspetif pengelolaan keuangan daerah perlu memahami dan mengejewantakan beberapa hal teknis tersebut.

Tantangan lainnya ialah bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah dikelola menggunakan mekanisme sistem sehingga keakuratan dan sistem pengendalian internal mampu di ciptakan di kabupaten yalimo. Beberapa potret kondisi teknis yang mampu memberikan keuntungan bagi Kabupaten yalimo menurut key informan yakni sebagai berikut: (1) Keterbukaan salah satu bentuk kepatuhan terhadap regulasi, (2) Mampu menjadi penyedia informasi keuangan daerah yang mudah di akses oleh masyarakat, (3) Merupakan kebutuhan mendesak di kabupaten yalimo, (4) Mampu membuat pencatatan laporan keuangan lebih efisien dan akurat, (5) Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, (6) Menampilkan informasi dengan efektif dan efesien yang akan dipakai oleh pengguna laporan, (7) Mendukung Akuntabilitas pelaporan.

Tabel 5 Rata-rata Skor Persepsi Key Informan Terhadap Sistem Informasi

No	Upaya Mengejewantakan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rata-rata Skor
1	Merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap regulasi	3.94
2	Mampu menjadi penyedia informasi keuangan daerah mudah di akses oleh masyarakat	3.59
3	Merupakan kebutuhan mendesak di kabupaten yalimo	3.82
4	Mampu menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat	3.59
5	Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya	3.47
6	Menampilkan informasi yang akurat secara efektif dan efesien yang akan dipakai oleh pengguna laporan	3.76
7	Mendukung Akuntabilitas pelaporan di tingkat kabupaten	3.53

Sumber: Data diolah, 2017

Melalui perbaikan pada aspek partisipasi dan sistem informasi keuangan daerah, diharapkan mampu memberikan perubahan kinerja pemerintah daerah terkait terciptanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Stigma bahwa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, SKPD secara rutin & tepat waktu dalam pelaporan keuangan maupun program, Ketepatan dan kesesuaian hasil dari suatu kegiatan dengan program yang telah ditetapkan, Realisasi anggaran & fisik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Adanya dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa hal tersebut diyakini melalui perbaikan pada kedua instrumen keuangan daerah tersebut mampu mendorong adanya perbaikan-perbaikan tata kelola keuangan daerah. Hal ini ditunjang dengan adanya opini key informan memberikan respon antara 3-4 artinya ini penting untuk segera di tindak lanjuti karena memiliki beberapa manfaat yang disebutkan pada sub indikator diatas.

KESIMPULAN

Partisipasi dalam penyusunan APBD, menunjukkan pola hubungan yang positif antara tingkat partisipasi dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan nilai pengaruh sebesar 74 persen dan secara probabilitas dapat dipertanggungjawabkan dengan perolehan hasil 0,12 lebih kecil dari standar 0,05. Sehingga partisipasi merupakan aspek penting dan dominan mampu mendorong terciptanya kinerja Pemerintah Daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah, merupakan bentuk pemangkasan alur birokrasi dalam pengelolaan teknis keuangan daerah, penelitian ini menghasilkan kerangka mendorong terciptanya

kinerja pemerintah daerah dari aspek keuangan daerah, maka SIKD mampu memberikan pengaruh sebesar 38 persen.

Menunjukkan bahwa, jika partisipasi dalam penyusunan APBD dan teknis pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem SIKD, positif akan memberikan dukungan kenaikan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 85,9 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, 2006, *Pengaruh Peran Manajemen Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Perusahaan : Persepsi Manajer Menengah BUMN*, jurnal Usahawan No 07 Tahun XXXV Juli
- Argyris, C.1952. *The Impact of Budget on People*, Ithaca, NY : The Controliership Foundation, Inc. Cornell University
- ArifahDistaAmalia, 2012, *Praktek Teori Ageni pada Entitas Publik dan Non Publik*, Prestasi Vol. 9 No. 1 - Juni 2012.
- Antara News, 2007, *Ketua BPK :Kinerja Pemda Masih Jauh dari Memuaskan*, Ambon, 30 April 2007
- Chong and Chong, 2000, *Budget Goal Commitment and Informational Effect of Budget Participation on Performance A Structural Equation Modelling Approach*, Behavioral Research in Accounting, Vol 114
- Brownell, Peter, 1982, *The Role of Accounting Data in Performance Evaluation, Budgetary Participation, and Organizational Effectiveness*, Journal of Accounting Research, Vol 20, pp 12-27
- Brownell, Peter and Mc. Innes Morris, 1986, *Budgetary Participation Motivation and Manajerial Performance*, The Accounting Review
- Coralie, Byant and White Louise, 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Terjemahan, LP3ES
- Devas, Nick, 1997, *Indonesia : What Do We Mean by Decentralization*, Public Administration and The Development, No 17 , 351-367
- Depken, Craig A, Giao X. Nguyen, danSalil K. Sarkar (2010). "Agency Costs, Executive Compensation, Bonding and Monitoring: A Stochastic Frontier Approach", diakses tanggal 29 Juli 2010 pada www.google.com
- Fathillah, Gina, *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kalimantan Timur*, tesis S2 Program PascaSarjanaUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Fress, Philip E, C. Rollin Niswonger, Carl S Warren, 1995, *Prinsip- prinsip Akuntansi*, Cetakanketiga, Edisikeenambelas, Jilid 2, AlihBahasa : HyginusRuswinartodan Herman Wibowo, PenerbitErlangga, Jakarta
- Ferdinand, A.T. 2006. *MetodePenelitianManajemen*, BP UniversitasDiponegoro, Semarang.
- Govindarajan, V, 2000, *Impact of Participation in The Budgetery Process*, 5th edition, South Western College Publishing
- Halim, Abdul danSyukriy Abdullah (2010). "Hubungandan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan yang diakses tanggal 29 Juli 2010 pada <http://www.bppk.depkeu.go.id/>*
- HaryantidanNasir, 2002, *Pengaruh Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial :Peran Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening*, SimposiumNasionalAkuntansi V, Semarang
- Haryanto, SahmuddindanArifuddin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, BadanPenerbitUniversitasDiponegoro, Semarang
- Haryanto, 2009, *Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Tahun 2007*, Tesis S2 Program PascasarjanaUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Heruwati, 2007, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2004-2006*, Tesis S2 Program PascasarjanaUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta

- Imam Ghozali, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. (1976). "Theory of the Firm :Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. North-Holland Publish Company
- Johnson, 1982, *Budgetary Behavior in Local Government A Case Study over 3 years*, Accounting, Organization and Society, 7 : 287-304
- Kahneman, D and A Tversky, 1979, *Prospect Theory: an Analysis of Decisions under Risk*, *Econometrica* 47 : p 263-291
- Kenis, I, 1979, *Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance*, The Accounting Review
- Li, Jing, Richard Pike, dan Roszaini Haniffa (2007). "Intellectual Capital Disclosure in Knowledge Rich Firms: The Impact of Market and Corporate Governance Factors", Working paper series, Diaksestanggal 27 Juni 2010 dari www.britannica.com
- Leiwakabessy, 2006, *Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Ambon Tahun 2004*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad, 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2000, *Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah*, Kompak No 23, 573-587
- Mardiasmo, 2001, *Perencanaan Keuangan Publik sebagai Suatu Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa*, Diskusi Panel Nasional Jakarta
- Milani, K, 1975, *The Relationship of Participation in Budget-setting of Industrial Supervisor Performance and Attitudes : a Field Study*, The Accounting review 50
- Mitzberg, H, 1973, *The Nature of Manajement Work*, Harper Row
- Mulyadidan Jhony Setyawan, 1999, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Aditya Media
- Munandar, 2000, *Budgeting :Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE Universitas Gajahmada, Yogyakarta
- Neumann, John von & Oskar Morgenstern (2007). "Theory of Games and Economic Behavior (Commemorative Edition)", Princenton University press
- Mas'ud, Faud, 2004. *Survei Diagnosis Organisasional (konsep dan Aplikasi)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nety, Herawati, 2003, *Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Poerwati, Tjahyaning, 2001, *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial :Budaya Organisasi dan Motivasi sebagai Variabel Moderating*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Riharjo, Ikhsan Budi, 2001, *Pengaruh Struktur Organisasional dan Locus of Control terhadap Hubungan antara Penganggaran Partisipatif dengan Kinerja Manajerial dan Kepuasan Kerja*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Rohman, Abdul, 2007, *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Pemda Kota, Kabupaten dan Provinsi di Jawa Tengah)*, Jurnal Maksi, Vol 7 No 2 Agustus 2007, hal 206-220
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- Sabeni, Arifin. (2005). "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Keagenan)" Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar
- Subramaniam dan Mia, 2001, *The Relation between Decentralization Structure, Budgetary Participation and Organizational Commitment, The Moderating Role of Managers Value Orientation toward Innovation*, Accounting, Auditing and Accountability, Vol 14 No. 1
- Supomo, Bambang, 1998, *Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi terhadap Keefektifan Anggaran Partisipatif dalam Peningkatan Kinerja Managerial :Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang
- Siegel, G and HR Marcony, 1989, *Behavioral Accounting*, South Western Publishing Co. Cincinnati, OH

- Setyawan, Setu, 2002, *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas*, Fakultas Ekonomi UMM, Malang
- Sinambela, Elizar, 2003, *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan
- Scott, William R. 2003, *Financial Accounting Theory*, 3th Ed. New Jersey : Prentice- Hall International, Inc
- Verbeeten, Frank H.M, 2008, *Performance Management Practices in Public Sektor Organizations : Impact on Performance*, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Volume 21 No 3, pp 427-454
- Woodcock, James dan Whiting, Rosalind H. (2009). "Intellectual Capital Disclosures by Australian Companies". Paper accepted for presentation at the AFAANZ Conference, Adelaide, Australia, July 2009. Diakses tanggal 12 Juni 2010 dari www.otago.ac.nz